

**PENYAMPAIAN HASIL
SIDANG KOMISI**

PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

TIM KOMISI I

BIDANG PENELITIAN DAN AKADEMIK

Ketua Komisi : Prof. Dr. Pagar Hasibuan, M.Ag (Kopertais Wil. IX)

Sekretaris : Dr. Abd. Wahid Hasyim (Kopertais Wil. I)

Tim Perumus :

- Priyono (UIN Walisongo)
- Yulizar (IAIN Padang Sidempuan)
- Sayuti (STAIN Gajah Putih)
- M. Yacoeb (Kopertais Wil. V)
- Dedi Sutendi (STAIN Malikusaleh)
- Sukarni (IAIN Antasari)
- Hartani (IAIN Palangkaraya)
- Subarja (UIN Jakarta)
- Abd. Khalik (STAIN Pamengkasan)
- Arif Junaidi (Kopertais X)

Topik Bahasan 1:

BIDANG AKADEMIK

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|---|---|---|
| 1. | Program 1000 doktor / tahun | <ol style="list-style-type: none">1. Besaran beasiswa lebih kecil dibandingkan dengan tunjangan profesi yang dihapus2. Dosen yang dikirim tidak linier3. Surat tugas belajar/izin belajar selama ini dikeluarkan oleh Sekjen dan perlu waktu lama | <ol style="list-style-type: none">1. Beasiswa yang didapat harus lebih besar daripada tunjangan profesi yang dihapus.2. Tunjangan profesi dialihkan ke Tunjangan Tugas Belajar3. Dosen harus linier4. Surat tugas belajar dan surat izin belajar cukup dikeluarkan oleh rektor/ketua atas nama Menteri |
| 2. | Kemudahan administratif doctor | Doktor yang belum mendapatkan surat ijin/tugas belajar oleh Sekjen | Dilakukan pemutihan oleh menpan melalui kemenag. |
| 3. | Pengembangan kurikulum berbasis KKNI | <ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum yang ada pada setiap prodi belum disesuaikan2. Kurangnya strategi dalam pembelajaran | <ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum direvisi sesuai dengan KKNI paling lambat tahun 20152. Pembelajaran yg berorientasi praktek/aplikatif |
| 4. | Penguatan penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris | <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa kesulitan berbahasa Arab dan Bahasa Inggris2. Mahasiswa kesulitan membaca buku berbahasa arab dan inggris | <ol style="list-style-type: none">1. Dosen membiasakan menggunakan bahasa Arab / Inggris sebagai pengantar belajar minimal 15 menit2. Pembelajaran mata kuliah berbasis arab dan inggris menggunakan referensi arab dan inggris |

Topik Bahasan 2:

BIDANG PENELITIAN

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|--|---|---|
| 1. | Upgrading metodologi penelitian | Lemahnya metodologi penelitian | Pelatihan metodologi penelitian mulai dari tingkat dasar sampai tingkat advance |
| 2. | Upgrading penulisan jurnal internasional | Penulisan hasil penelitian belum sesuai dengan standar SCOPUS | Mengadakan pelatihan penulisan penelitian standar SCOPUS |
| 3. | Pemetaan penelitian berbasis distingsi dan excelensi PTKI masing-masing daerah | Belum tersedia pedoman penelitian berbasis distingsi dan excelensi | Membuat pedoman teknis penelitian berbasis distingsi dan excelensi |
| 4. | Kategorisasi penelitian untuk menunjang akreditasi | <ol style="list-style-type: none">1. Kategorisasi kualitas penelitian belum standar dalam pembiayaan2. Hasil penelitian belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat | <ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan standar kualitas penelitian dengan pembiayaannya2. Deseminasi hasil penelitian |
| 5. | Perluasan Akses penelitian yang berskala internasional | Terbatasnya jumlah penelitian skala internasional | Tersedianya dana penelitian skala internasional secara memadai |

TIM KOMISI II

BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN

Ketua Komisi : Dasrizal (Karo IAIN Imam Bonjol Padang)

Sekretaris : Eramli (Karo UIN Suska Riau)

Tim Perumus :

- » Johanis (IAIN Jambi)
- » Mukhlis Latif (UIN Makassar)
- » Naharuddin (STAIN Pare Pare)
- » H. Muchlis A. Mahmud (IAIN Palu)
- » Satya Abd. Rohman (IAIN Surakarta)
- » Testru Hendra (Kopertais Wilayah VI)
- » Farid Al Zasal (STAIN Kudus)
- » Irham Baihaqi T (STAIN Pekalongan)
- » Kenya Budiani (UIN Yogyakarta)
- » Kusmiyatun (IAIN Purwokerto)
- » Hj. Nahariah (Kopertais Wilayah VIII)
- » Yasrizal (STAIN Batusangkar)
- » Lamondo (STAIN Kendari)

Topik Bahasan 1 :

BIDANG KELEMBAGAAN

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|--------------------------|---|---|
| 1. | Regulasi Pengelolaan BLU | Belum ada regulasi BLU dari Kementerian Agama | <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Agama segera menerbitkan regulasi pengelolaan BLU turunan dari PMK2. Mendorong Perguruan Tinggi yang belum berstatus BLU menjadi berstatus BLU |
| 2. | Penempatan SPI | Multi tafsir pengertian peran dan tugas SPI diantara Perguruan Tinggi | Perlu adanya regulasi tentang SPI dari Kementerian Agama |
| 3. | Reformasi Birokrasi | Reformasi Birokrasi berjalan lambat karena tidak didukung dengan instrumen pendidikan dan pelatihan | <ol style="list-style-type: none">1. Diktis berkoordinasi dengan Balitbang Diklat untuk memperbanyak Diklat kepemimpinan berjenjang2. Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi perlu mendapatkan beasiswa S2 dan S3 |
| 4. | Ortaker | Adanya Perbedaan struktur organisasi (ortaker) diantara Perguruan Tinggi | Perlu penyempurnaan ortaker sesuai dengan realitas pada Perguruan Tinggi |

Topik Bahasan 2 :

BIDANG KETENAGAAN

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|---|---|--|
| 1. | Eselonisasi Tunjangan Kinerja | Tunjangan Kinerja tidak ditetapkan berdasarkan standar eselonisasi | Grade Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan eselonisasi agar tidak membedakan tunjangan pusat dan daerah |
| 2. | Tunjangan Dosen | Tunjangan fungsional yang diberikan tidak sebanding dengan tugas dosen | Perlu ditinjau kembali tunjangan fungsional dosen |
| 3. | Dosen yang mendapatkan tugas tambahan | Sering terjadi kesalah pahaman tentang Tupoksi | <ol style="list-style-type: none">1. Diktis mengusulkan kepada Balitbangdiklat untuk mengadakan Diklat Manajemen Kepemimpinan di lingkungan Perguruan Tinggi2. Setiap Perguruan Tinggi melaksanakan workshop untuk pemantapan pemahaman tupoksi |
| 4. | Mutasi pegawai administrasi ke pegawai fungsional | Kebijakan pada perguruan Tinggi berbeda | Perlu menerbitkan petunjuk teknis |
| 5. | Rekrutmen Dosen (CPNS) | Pola rekrutmen dosen (CPNS) hasilnya tidak merata pada setiap fakultas akibat lemahnya koordinasi dan perencanaan kebutuhan tenaga dosen antara pusat dan daerah. | <ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah2. Mempertimbangkan alumni Perguruan Tinggi |
| 6. | Kehadiran Dosen | Pemahaman dosen yang kurang optimal | Perlu aturan khusus jam kerja Dosen |

TIM KOMISI III

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Ketua : Safriansyah

Sekretaris : Nani Pujihastuti

Tim Perumus :

- IAIN Raden Intan Lampung
- IAIN Ternate
- IAIN Ambon
- IAIN Bengkulu
- IAIN Raden Fatah Palembang
- UIN MMI Malang
- Kopertais Jambi
- Kopertais Surabaya
- UIN Malang
- IAIN Manado
- IAIN Tulungagung
- IAIN Jember
- IAIN Gorontalo
- STAIN Kediri
- STAIN Sorong
- STAIN Jayapura
- STAIN Bangka Belitung
- STAIN Ponorogo
- STAIN Metro
- STAIN Curup
- Kopertais Palembang

Topik Bahasan :

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Aksi |
|-----|--|--|--|
| 1. | PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PADA PTKI NEGERI | <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya database tentang kondisi sarana dan prasarana. | <ol style="list-style-type: none">1. Perlu diadakan pemetaan khusus tentang sarana prasarana PTKIN secara detail dan menyeluruh, serta kebutuhannya.2. Melakukan penatausahaan kembali BMN.3. Melakukan advokasi hukum dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan sarana prasarana.4. Melakukan intervensi terhadap proses serah terima rusunawa. |
| | | <ol style="list-style-type: none">2. Minimnya regulasi tentang standar pengembangan sarana dan prasarana. | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat regulasi terkait dengan standar pengembangan sarana prasarana2. Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang regulasi standar sarana prasarana |
| | | <ol style="list-style-type: none">3. Pemahaman tentang tugas pengelolaan sarana prasarana masih kurang baik. | <ol style="list-style-type: none">1. Adanya rekrutmen PNS dengan kualifikasi tenaga perencanaan2. Sosialisasi, diklat, workshop dan short course tentang pengelolaan sarana prasarana |

Lanjutan

| No | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Aksi |
|----|---------------|--|--|
| | | 4. Belum adanya Grand Design Pengembangan sarana prasarana masing-masing PTKIN | <ol style="list-style-type: none">1. Menginstruksikan kepada PTKIN agar membuat grand design.2. Melakukan survai ke PTKIN sebelum melakukan alokasi pagu anggaran3. Alokasi anggaran agar memperhatikan dengan grand design yang dimiliki dari masing-masing PTKIN |
| | | 5. Belum adanya sistem informasi terpadu secara online. | <ol style="list-style-type: none">1. Agar membuat sistem informasi secara online tentang kondisi sarana prasarana2. Adanya Sosialisasi dan bimtek terhadap sistem informasi sarana prasarana |
| | | 6. Kondisi ruang kuliah, ruang dosen, perpustakaan, laboratorium, sarana ICT, dan sarana lainnya yang masih kurang baik kuantitatis maupun kualitasnya | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan alokasi anggaran sarana dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar baik kuantitas maupun kualitasnya2. Pengadaan ruang khusus teleconference beserta kelengkapannya |
| | | 7. Kendala proses sertifikat lahan tanah pada PTKIN | Diperlukan bantuan / intervensi pusat dalam penyelesaian sertifikat lahan tanah |
| | | 8. Masih adanya gedung-gedung yang belum mendapatkan IMB | Diperlukan bantuan / intervensi pusat dalam penyelesaian IMB |

Lanjutan

| No | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Aksi |
|----|---|--|---|
| 2. | BANTUAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PADA PTKI SWASTA | 1. Belum adanya peta sarana prasarana PTKI Swasta yang lengkap. | 1. Perlu diadakan pemetaan khusus tentang sarana prasarana PTKI swasta secara detail dan menyeluruh, serta kebutuhannya. 2. Adanya peningkatan kemampuan terhadap tenaga operator di kopertais maupun pada masing-masing PTKI Swasta |
| | | 2. Adanya regulasi tentang penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan akun 57. | Mengupayakan aturan atau regulasi tentang penyaluran bantuan sosial selain akun 57 |
| | | 3. Masih rendahnya keberpihakan pusat anggaran sarana prasarana bagi PTKI Swasta | Meningkatkan alokasi anggaran pada PTKI Swasta |
| | | 4. Positioning KOPERTAIS yang masih belum jelas. | Mempercepat proses menjadikan kopertais menjadi satker yang otonom |

Lanjutan

| No | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Aksi |
|----|---------------|--|--|
| | | 5. Kurangnya SDM pada KOPERTAIS, baik jumlah maupun kualitasnya. | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1064 268 1841 405">1. Melakukan penambahan personil pada Kopertais baik pegawai maupun dosen (DPK)<li data-bbox="1064 419 1841 511">2. Melakukan peningkatan kualitas melalui workshop, pelatihan |
| | | 6. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pada KOPERTAIS. | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1064 569 1841 661">1. Perlunya perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana pada kopertais<li data-bbox="1064 675 1841 812">2. Alokasi pagu anggaran pada KOPERTAIS agar dirumuskan secara konkrit untuk kopertais |

PENYAMPAIAN HASIL SIDANG KOMISI

BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

TIM KOMISI I

BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

Ketua Komisi : Drs.H. Noor Hamid, M.Pd.I (Kabid Penmad D.I.Yogyakarta)

Sekretaris : Samsuri, M.Pd (Kabid. Penmad. Sultra)

Tim Perumus :

- Drs. H. Jam'un, M.Pd.I, Kabid Penmad Jateng
- Dra. Hj. Ity Rukayah, MA, Kabid Penmad Kaltim
- Drs. H. Ridwan, MA, Kabid Penmad Kalbar
- Drs. H. Jalal Suyuti, M.Pd, Kabid Penmad NTB
- Drs. H. Abu Sofyan, MA, Kabid Penmad Kepri
- Drs. H. Supandi, MA, Kabid Penmad Jatim
- Drs. H. Sirajudin Mandeng, Kabid Penmad Sulut
- Drs. H. Andewi, Kabag. TU Jateng
- Drs. H. Hamdani, M.Pd. Kabid. Penma Bengkulu

Topik Bahasan I :

KURIKULUM

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|---|--|---|
| 1. | Permendiknas No.160 Th.2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 | Kemenag Memberlakukan K13 pada Mapel PAI dan Bahasa Arab di Madrasah dan Mapel umum ke KTSP 2006 | <ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Buku Mapel PAI dan Bahasa Arab pada madrasah.2. Peningkatan pelaksanaan BinteK PTK3. Penyusunan Regulasi tentang Pelaksanaan Kurikulum di Madrasah4. Madrasah yang telah melaksanakan Pendampingan dapat melanjutkan K135. Madrasah yang telah siap melaksanakan K13 dapat melanjutkan K13 |

Topik Bahasan II :

PTK

| No | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|----|--|--|---|
| 1. | PMA No.29/2014 Tentang Kepala Madrasah | <ol style="list-style-type: none">1. Pemberlakuan PMA No. 29/2014 menimbulkan resistensi keberadaan Madrasah swasta2. Pengangkatan Guru PNS yg menjadi Ka. Madrasah Swasta tidak terakomodir dalam PMA | <ol style="list-style-type: none">1. PMA No. 29/2014 perlu direvisi2. Perlunya regulasi yg memperkuat keberadaan PTK PNS pd mad. Swasta.3. Perlunya Peningkatan kompetensi Ka. Mad. Swasta.4. Tahun 2015 Balai Diklat harus melaksanakan Diklat Calon Ka. Madrasah |
| 2. | PMA No.43/2014 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi GB PNS pd Kemenag. | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 3 ayat 2 belum mengakomodir guru yg mendpt tugas tambahan sebagai Ka. Lab./ Perpust. Untuk mndptkn beban 12 jpl / minggu.2. Pasal 4.(2) beban kerja GBPNS paling sedikit 12 jam TM perminggu pd Satminkal.3. Belum tersedianya dana TA. 2015 untuk tunjangan GBPNS yg telah Inpassing | <ol style="list-style-type: none">1. PMA No. 43/2014 perlu direvisi2. Harus dianggarkan pada APBN-P 2015 |

Lanjutan

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 3. | SE Pendis No. D.I/Kp.04.1/104/2013 tentang Disiplin Kehadiran Pengawas Mengikuti PMA No. 28/2013 yg menetapkan Jam Kerja Pengawas 5 (lima) Hari Kerja | SE dimaksud bertentangan dengan PP No. 74/2007 tentang Guru. | SE tersebut perlu di tinjau ulang. |

Topik Bahasan III :

KESISWAAN

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 1. | Keg. Kesiswaan Event Nasional | Tidak tersedia dana pada Kab/Kota dan Provinsi | Penyediaan dana Kegiatan Kesiswaan mulai dari Kab/kota, Provinsi dan Nasional |
| 2. | BOS dan BSM | Data kurang valid | <ol style="list-style-type: none">1. EMIS merupakan basis data BOS dan BSM2. Perlu rekonsiliasi anggaran antara Pusat dan Daerah3. Perlu Penegasan MoU tentang pencairan Anggaran BOS dan BSM bagi yang menggunakan Bank Penyalur |

Topik Bahasan IV :

SARPRAS

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|---------------------------|--|---|
| 1. | Bantuan yg bersifat fisik | <ol style="list-style-type: none">1. Penempatan akun 522. Belum optimalnya Data kebutuhan Sarpras | <ol style="list-style-type: none">1. Perlu penempatan Bansos Pendidikan dalam Akun khusus2. Bansos Pendidikan untuk Mad. swasta ditempatkan pd Satker Kemenag. Kab./Kota.3. Kanwil harus segera mendata dan mempersiapkan IKK4. Kemenag. RI menerbitkan Pendum dan Juknis bantuan5. Validasi data dan Memaksimalkan data EMIS |
| | | Belum sinerginya Tim perencanaan Bidang/Kasi Penma Kab/Kota dengan Perencanaan Kanwil dan Pusat | Perlu regulasi dan Rakor bersama |

Topik Bahasan V :

KELEMBAGAAN

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|--------------------------|--|---|
| 1. | Penegerian Madrasah | Penegerian madrasah terlambat | Mempercepat penegerian Madrasah |
| 2. | Akreditasi | Masih banyak madrasah yang belum terakreditasi terutama RA | Perlu penambahan kuota dan penyediaan anggaran Akreditasi |
| 3. | Madrasah Aliyah Kejuruan | Turunan Regulasi PMA No. 90/2013 belum ada | Perlu percepatan Juknis MAK |

TIM KOMISI II

BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

Penanggungjawab: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Ketua Komisi : Sholikhin (Kanwil Kemenag Jawa Tengah)

Sekretaris : Mamat Selamat B (Dit. PD. Pontren)

Tim Perumus :

Abdul Qohar (Kanwil Bengkulu)

Putloro (Kanwil SumSel)

Anwar D. (Kanwil Papua Barat)

H. Muh. Syahrir (Kanwil KalTim)

Hj. Yuni S. (Kanwil SulTeng)

Rahwan (Kanwil DKI Jakarta)

Husnul Maram (Kanwil JaTim)

M. Nasir (Kanwil Sulawesi Tengah)

Ilham (Dit. PD. Pontren)

Cucum Sumiati (Dit. PD. Pontren)

Imanah (Dit. PD. Pontren)

U. Ulumuddin (Kanwil Riau)

Abrar Zym (Kanwil Aceh)

Rusli (Kanwil Jambi)

Rikson Hasanati (Kanwil Sulut)

Solahuddin Ahmad (Dit. PD. Pontren)

Ibrahim T.S (Kanwil Gorontalo)

Syafrudin B (Kanwil Gorontalo)

Trismariana (Kanwil Kepulauan Riau)

Syarfullah (Dit. PD.Pontren)

Ahmad Rusdi (Dit. PD.Pontren)

Dah Saefullah (Kanwil Jawa Barat)

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|--------------------------------|--|---|
| 1. | Tugas dan Fungsi | Banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi/KMA | Sinkronisasi jabatan struktural dengan SKP |
| 2. | Pendidikan Diniyah Takmiliyah | Pendidikan Diniyah Takmiliyah belum sinergi dengan madrasah dan sekolah | Mengembangkan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam bentuk satuan dan program untuk disinergikan dengan kegiatan Madrasah dan Sekolah. Dalam implementasinya diperlukan sinergi antara Dit. Pontren dan Dit. PAIS serta Kementerian Agama dan Kemendikbud |
| 3. | Pengembangan Pesantren Tahfidz | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak santri pesantren Tahfidz yang tidak mendapat layanan pendidikan dasar 2. Ketidakjelasan kewenangan yang menangani Pesantren Tahfidz | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pesantren Tahfidz harus ditempatkan dalam konteks layanan wajib belajar 9 tahun atau PMU 2. Pengelolaan pengembangan Pesantren Tahfidz dikelola oleh pejabat yang menangani pendidikan Al Qur'an |
| 4. | Sistem Pendataan dan Informasi | Tingkat struktur kelembagaan pendataan (EMIS) tidak sebanding dengan tugas dan fungsinya | Memperkuat sistem pendataan dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas EMIS yang dikelola oleh pejabat setingkat eselon 2 di pusat |

Lanjutan

| No. | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|-----|------------------------------|--|---|
| 5. | Kartu Indonesia Pintar (KIP) | Ketidakjelasan regulasi dalam penyaluran KIP | Perlunya segera menyusun landasan hokum dan Juknis untuk program KIP untuk memastikan dana sampai ke penerima dengan mekanisme yang mudah |
| 6. | Program Wajar Dikdas | Kesulitan lulusan PPs wajar dikdas yang tidak bias melanjutkan ke jenjang di atasnya karena tidak mempunyai NISN | Peserta program wajar Dikdas PPs diusahakan harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) |

TIM KOMISI III

BIDANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ketua Komisi : Abubakar Sidik, M.Ag (Kabid PAI Kanwil Jawa Barat)

Sekretaris : Drs. M. Jandan Zaelani D., MH. (Kasi PAI Kanwil DKI Jakarta)

Tim Perumus :

- Kanwil Bangka Belitung
- Kanwil Lampung
- Kanwil Nusa Tenggara Timur
- Kanwil Kalimantan Barat
- Kanwil Kalimantan Tengah
- Kanwil Kalimantan Selatan
- Kanwil Maluku
- Kanwil Maluku Utara
- Kanwil Papua
- Direktorat PAI

| No | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|----|-------------------|---|---|
| 1. | Pentas PAI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis - jenis lomba dan Anggaran. 2. Tenggang Waktu Pelaksanaan 3. Kegiatan yang dilombakan 4. Tempat pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan anggaran dan menambah jenis - jenis lomba 2. Setiap Tahun dan sebelum bulan agustus 3. Nasyid dan tahfidz dilombakan di SMA dan SMK. 4. Di Makasssar dan di tempat terbuka sebagai syiar bila diluar hotel. |
| 2. | Implementasi K13 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No 160. 2. Pengadaan Buku Belum Disediakan 3. Apakah Kurikulum 2013 masih dilanjutkan atau tidak. 4. Kisi Kisi belum diberikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek K13 untuk PAI tetap dilaksanakan. 2. Agar disediakan buku oleh Kemenag Pusat 3. Kurikulum 2013 tetap dilanjutkan bagi sekolah sekolah sasaran. Sekolah lainnya memakai KTSP. 4. Agar kemenag pusat memberikan Kisi Kisi USBN dibuat 2 format : sesuai dengan K13 dan KTSP. |
| 3. | Rohis SMP/SMA/SMK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran dan tempat pelaksanaan. 2. Diusulkan Mulai dari SMP untuk Perkemahan Rohis 3. Kejelasan pelaksanaan rohisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan anggaran dan menetapkan tempat tempat pelaksanaan. 2. Perkemahan rohisi agar dilakukan perkemahan rohisi dimulai SMP 3. Dibuatkan Pedoman rohisi yang komprehensif meliputi organisasi dan pembiayaan. |

| No | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|----|---|--|--|
| 4. | Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan penerima dan kekurangan anggaran. 2. TPG PAI belum dipisahkan dengan Penmad 3. Ada tunjangan GPAI Non PNS yang Belum Sergur. 4. Belum ada Pedoman Teknis pemenuhan beban kerja tambahan 24 jam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman / regulasi yang jelas dan ketersediaan anggaran Kemenag. 2. Untuk tunjangan profesi sebaiknya dipisah dengan penmad 3. Untuk tunjangan GPAI Non PNS supaya diberikan Tunjangan Fungsional GPAI yang Non PNS. 4. Sebaiknya dibuatkan pedoman umum oleh kemenag pusat. |
| 5. | Beasiswa S2 GPAI dan Pengawas PAI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran belum merata disetiap propinsi. 2. Tidak ada koordinasi dari perguruan tinggi pelaksana dengan kanwil kemenag terkait. 3. Perlu ada beasiswa kualifikasi S3 untuk tenaga kependidikan PAI. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan beasiswa diadakan masing-masing. 2. Harus ada kordinasi dengan kanwil kemenag terkait dengan perguruan tinggi. 3. Diberikan Beasiswa untuk S3 untuk tenaga kependidikan PAI. |

| No | Isu Strategis | Peta Permasalahan | Rekomendasi / Rencana Aksi |
|----|---------------------|--|---|
| 6. | Mutasi Pengawas PAI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan pengawas PAI dan belum ada regulasi yang mendukung untuk kelancaran mutasi pengawas PAI. 2. Perlu ada peninjauan ulang secara kritis untuk PMA kepengawasan agar menyesuaikan dengan peraturan lebih tinggi. 3. Rekrutmen pengawas berpendidikan S2 perlu dilakukan perlakuan berbeda (tidak reguler) 4. Perlu ada perubahan nomenklatur kepengawasan untuk mempermudah tugas tugas pengawas PAI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan formasi pengangkatan pengawas dan pembuatan regulasi yang relevan untuk pengawas PAI. 2. Sebaiknya kemenag pusat meninjau ulang tentang PMA kepengawasan dan supaya bisa sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. 3. Untuk rekrutmen sebaiknya dilakukan dengan cara tepat dan kompeten untuk mendapatkan pengawas yang sesuai dengan yang seharusnya. 4. Kemenag pusat melakukan perubahan nomenklatur untuk kepegawasan PAI. |